LAKIP APBD TAHUN 2025

I. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan :

a. Indikator Kinerja :

- Masukan (Input) :
  a. Sumber dana : APBD
  b. Dana : Rp.270.500.000,-
  c. Kebijakan pemerintah

- Keluaran (Output) :
  Tersedianya obat-obatan dan vitamin suportif untuk pengendalian penyakit hewan dan peningkatan produktifitas peternakan dengan rincian pemakaian anggaran (target dan realisasi) kegiatan Penanggulangan Wabah Penyakit Hewan Menular Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
I	**Belanja Barang dan Jasa**	**270.500.000**	**265.586.354**	**98,20**
1	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor	3.500.0 00	3.500.000	100
	-Alat tulis kantor			
2	Belanja Obat-obatan			
	-Belanja Vaksin Rabies	60.000.000	55.278.000	92,13
	-Obat Hewan dan Vitamin	150.000.000	149.860.767	99,91
3	Belanja Makan dan Minuman Rapat			
	-Konsumsi Rapat Keswan	7.000.000	7.000.000	100
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	-Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000	40.000.000	100
	-Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000	10.000.000	100

- Hasil (Outcome) :
  a. Ternak sehat;
  b. Menurunnya angka kejadian penyakit;
  c. Peningkatan produktifitas ternak.

b. Evaluasi Kinerja

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 2025 adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan menular yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Adapun capaian indikator kinerja adalah persentase penurunan penyakit ternak.

Tahun 2025 kejadian penyakit hewan (yang dilaporkan) sebanyak **449** kasus, laporan ini mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.720 kasus laporan penyakit yang terlapor di iSIKHNAS. Kejadian penyakit yang dimaksud merupakan penyakit infeksius, sehingga persebaran kejadian penyakit terjadi dalam jumlah masif dan dalam waktu singkat.

Berdasarkan Kepmentan 708 tahun 2014 daerah terdampak PMK di Sumatera Selatan sebanyak 17 Kab/ Kota. Melalui alokasi vaksin dari Kementerian Pertanian sejumlah 296.200 dosis sudah di lakukan vaksinasi sebanyak 296.200 dosis dari hasil ini didapatkan persentase sebanyak 100% terhadap pemberian vaksin PMK. Pada tahun 2025, data *causalty* akibat rabies, adalah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) sebanyak 11 kasus tersebar dibeberapa kecamatan di kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Penukal Abab Lematang Ilir dan telah dilakukan Vaksinasi sebagai tindak lanjut dari laporan serta vaksinasi terhadap Hewan Pembawa Rabies (HPR) lainnya.

Berdasarkan iSIKHNAS, di tahun 2025 setidaknya terdapat 14 kerbau yang terinfeksi penyakit SE di Kabupaten Lahat dan telah dilakukan pengobatan sebagai tindak lanjut dari laporan penyakit tersebut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 100%.

Kejadian ini merupakan salah satu parameter diperlukannya program pencegahan dan pengendalian penyakit hewan yang memadai. Penyusunan program pencegahan dan pengendalian untuk penyakit hewan menular didasarkan pada risiko tertularnya populasi rentan di wilayah dan munculnya kembali (*relapse)* kejadian penyakit di wilayah tersebut. Tidak kalah penting adalah kapasitasi sumber daya manusia (SDM) dalam penanggulangan penyakit hewan.

Adapun rincian laporan penyakit hewan di wilayah Sumatera Selatan, sebagai berikut:

I. **Rabies**

Salah satu dari Penyakit Hewan Menular Strategis di wilayah Sumatera Selatan yang penting untuk ditanggulangi adalah rabies. Rabies merupakan penyakit virus yang dapat menular antara hewan ke manusia (zoonosis). Hewan Penular Rabies (HPR) utama adalah anjing, kucing, kera.

II. **Jembrana**

Kasus jembrana pada sapi bali masih dilaporkan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Populasi rentan di wilayah Musi Rawas Utara dan wilayah dengan populasi padat ternak sapi bali perlu dilakukan vaksinasi Jembrana.

III. ***Septicaemia Epizootica* (SE)**

Septicaemia Epizootica (SE) atau lebih dikenal sebagai penyakit ngorok adalah penyakit yang menyerang hewan sapi atau kerbau, bersifat akut dengan mempunyai tingkat kematian yang tinggi.

Penyakit SE memiliki tingkat kematian (*mortality rate*) dan tingkat kesakitan *(morbidity rate*) yang tinggi, utamanya pada hewan di wilayah yang belum pernah terpapar atau dilaksanakan program vaksinasi SE.

Program vaksinasi merupakan salah satu langkah pencegahan yang paling efektif yang dapat diambil dalam mencegah merebaknya penyakit infeksius. Mengingat dampak kerugian langsung dari kematian hewan yang terinfeksi, penurunan produktifitas peternakan, dan ancaman untuk potensi plasma nutfah wilayah Sumatera Selatan, diperlukan setidaknya **program vaksinasi SE berkala pada hewan rentan di wilayah Sumatera Selatan, utamanya untuk kerbau dan sapi.**

c. Permasalahan dan Pemecahan Masalah

- **Permasalahan :**

1. Anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan vaksin terlalu kecil, bila dibandingkan dengan populasi rentan di wilayah Sumatera Selatan;
2. Munculnya wabah penyakit hewan menular strategis seperti *Septicaemia epizootica,* Jembrana, dan Rabies secara sporadik;
3. Petugas dokter hewan, paramedik veteriner, dan petugas kesehatan hewan lainnya di kabupaten/kota masih sangat kurang;

4. Minimnya pelatihan peningkatan kapasitasi untuk SDM di bidang kesehatan hewan;
5. Dana pendampingan pelaksanaan kegiatan tidak ideal;
6. Tidak ada operasional pelayanan kesehatan hewan;
7. Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait penanggulangan penyakit hewan baik komoditas ternak maupun hewan kesayangan di tingkat masyarakat.

- **Pemecahan Masalah :**
  1. Alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin, obat-obatan, dan vitamin suportif secara proporsional terhadap populasi rentan;
  2. Menghimbau kabupaten/kota untuk membangun dan aktif mengoperasikan Puskeswan terutama di daerah padat ternak/hewan;
  3. Untuk dilakukan pengetatan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  4. Mengusulkan agar dilakukan penambahan tenaga medis dokter hewan untuk di provinsi maupun di kabupaten/kota;
  5. Agar dilakukan pelatihan untuk membentuk tenaga vaksinator di lapangan dan tidak melakukan mutasi staf yang sudah pernah dilatih;

6. Advokasi ke dinas kabupaten/kota untuk dapat mengalokasikan dana operasional pelayanan kesehatan hewan, serta ke kepala desa;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyakit hewan.

Palembang, Desember 2025

Kabid Keswan dan Kesmavet

Ir. Yusi Zuwartini, M.M

196807291994032003